

Peran Standar Akuntansi, Sistem Informasi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

RA. Jauza Hanun R.W.H¹, Hestin Sri Widiawati², Andy Kurniawan³

Department of Accounting, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 31 Juli 2025

Revised: 23 Agustus 2025

Accepted: 04 September 2025

Keywords:

Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem Informasi Akuntansi

Pengendalian Internal

Kompetensi Sumber Daya

Manusia

Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran standar akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi sektor publik. Penelitian dilakukan terhadap 49 pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Kediri. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel kompetensi sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan pemahaman mendalam terhadap praktik akuntansi publik agar kualitas laporan keuangan semakin andal dan transparan.

This study aims to analyze the role of financial accounting standards, accounting information systems, internal control, and human resource competence on the quality of financial statements in public sector organizations. The research was conducted on 49 employees involved in the preparation of financial statements in Kediri Regency. The analytical method used is multiple linear regression with a t-test to determine the significance of each variable. The results show that only the variable of human resource competence has a significant effect on the quality of financial statements, while financial accounting standards, accounting information systems, and internal control do not show significant effects. The implication of this study emphasizes the importance of improving human resource competence through technical training and a deep understanding of public accounting practices to enhance the reliability and transparency of financial statements.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

RA. Jauza Hanun Raras Widowati Hapsari

Department of Accounting, Universitas Nusantara PGRI Kediri,

Jl. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64112

Email: hanunjauza1@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah semakin menguat. Masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya publik secara jujur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai instrumen utama dalam menilai kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menjadi cerminan dari tata kelola yang baik (good governance). Menurut Ananda (2022), laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Namun, idealisme tersebut belum sepenuhnya terwujud di banyak pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangannya. BPK mencatat beberapa kelemahan signifikan, seperti penatausahaan aset tetap yang belum tertib, serta pencatatan belanja yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu diperbaiki, khususnya dalam aspek penerapan standar akuntansi, efektivitas pengendalian internal, serta kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Fenomena tersebut mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor penting, antara lain penerapan SAP, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Namun, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Penelitian Rohmah dkk. (2020), misalnya, menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sementara Aprsiansyah dkk. (2020) melaporkan hasil yang sebaliknya. Inkonsistensi juga tampak pada variabel SIA dan kompetensi SDM. Beberapa studi (Fitriani, 2021; Puspita, 2022) menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat, tetapi penelitian lain (Sari & Nugroho, 2021) tidak menemukan pengaruh yang berarti. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh variasi kondisi daerah, tingkat kematangan sistem informasi, serta kapasitas aparatur yang berbeda-beda di setiap lingkungan pemerintahan.

Berangkat dari kondisi dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kediri. Fokus ini dipilih karena daerah tersebut relatif jarang menjadi objek penelitian, padahal memiliki dinamika pengelolaan keuangan yang menarik untuk ditelusuri. Kebaruan (novelty) penelitian ini tidak hanya terletak pada konteks daerah yang masih terbatas dikaji, tetapi juga pada pengujian keempat variabel utama secara simultan dalam satu model analisis empiris. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai interaksi antarvariabel dan kontribusi masing-masing faktor terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam mengidentifikasi determinan kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah Indonesia. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat penerapan SAP, mengoptimalkan penggunaan SIA, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta mengembangkan kompetensi aparatur pengelola keuangan. Bagi auditor dan masyarakat, temuan penelitian ini juga dapat menjadi tolok ukur transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

KAJIAN TEORI

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai tolok ukur penting kinerja pemerintah daerah. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 (IAI, 2010), kualitas laporan diukur dari empat karakteristik utama: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, pada praktiknya karakteristik tersebut mudah diucapkan tetapi sulit direalisasikan secara konsisten karena dipengaruhi oleh unsur teknis, sistemik, dan manusiawi. Di bawah ini dijabarkan empat pilar yang kerap disebut sebagai determinan kualitas laporan beserta analisis mendalam tentang mekanisme pengaruh, kendala implementasi, alasan inkonsistensi hasil penelitian, dan implikasi pengukuran.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan kerangka normatif yang dirancang untuk memadukan prinsip akrual ke dalam pelaporan keuangan sektor publik. Dalam tataran teoritis, penerapan SAP yang konsisten diyakini mampu meningkatkan relevansi laporan keuangan melalui pengakuan peristiwa ekonomi secara tepat waktu, sekaligus memperkuat keandalan dengan menetapkan aturan pengukuran dan pengungkapan yang seragam. Dengan demikian, SAP tidak hanya memastikan keterbandingan laporan antarperiode dan antarinstansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik.

Indikator seperti basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi, periodisitas, dan konsistensi tidak sekadar menjadi daftar kepatuhan administratif, melainkan mencerminkan dimensi implementasi yang saling berkaitan dan menentukan kualitas penerapan SAP secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, penerapan SAP masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait valuasi aset tetap, proses konsolidasi data antar-SKPD, serta kebijakan transisi dari basis kas menuju akrual yang belum sepenuhnya berjalan mulus.

Keragaman hasil penelitian tentang dampak SAP juga menunjukkan kompleksitas penerapannya. Perbedaan hasil tersebut sering disebabkan oleh variasi fase adopsi antar daerah, perbedaan dalam cara mengukur penerapan SAP apakah hanya sebatas kepatuhan formal atau sudah mencakup kualitas penerapan teknis serta adanya 1523actor mediasi seperti kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, penilaian terhadap penerapan SAP sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan kepatuhan semata, melainkan didasarkan pada bukti nyata seperti hasil audit teknis, rekonsiliasi data, serta penerapan prinsip akrual yang substansial dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak sekadar berfungsi sebagai perangkat lunak, tetapi merupakan kerangka menyeluruh yang menopang seluruh proses pelaporan keuangan, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian laporan akhir. SIA yang dikelola secara efektif dapat mempercepat siklus pelaporan, meminimalkan kesalahan manual, serta menyediakan jejak audit yang memperkuat transparansi dan keandalan laporan keuangan. Namun, efektivitas SIA sangat ditentukan oleh kesiapan organisasi, yang mencakup integrasi antarunit, tata kelola teknologi informasi, serta kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Berbagai penelitian menunjukkan dua kecenderungan penting: penerapan teknologi canggih tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai sering kali menghasilkan manfaat yang terbatas, sedangkan sumber daya manusia yang kompeten bahkan dengan sistem sederhana mampu meningkatkan kualitas pelaporan secara signifikan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kualitas SIA sebaiknya tidak hanya didasarkan pada keberadaan sistem itu sendiri, melainkan juga pada tingkat kematangan, keandalan, dan konsistensi kinerjanya dalam mendukung proses akuntansi di lingkungan pemerintah daerah.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berfungsi sebagai lapisan terakhir yang mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan sekaligus menjaga integritas data. Sistem pengendalian yang berjalan efektif memastikan setiap transaksi dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti yang sah. Namun, dalam praktiknya sering muncul kendala yang melemahkan efektivitas pengendalian, seperti tingginya rotasi pegawai, adanya intervensi politik, dan lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

Perbedaan hasil penelitian mengenai efektivitas pengendalian internal umumnya disebabkan oleh variasi metode pengukuran yang digunakan. Pendekatan berbasis self-assessment dan kuesioner kerap menimbulkan bias afektif karena bergantung pada persepsi responden, sementara hasil audit eksternal lebih objektif tetapi tidak selalu tersedia untuk seluruh unit analisis. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan penilaian mandiri, bukti audit, dan indikator hasil seperti frekuensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan gambaran yang lebih valid dan menyeluruh tentang efektivitas pengendalian internal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan SAP memberikan standar baku sehingga laporan lebih relevan dan dapat dibandingkan (Rohmah dkk., 2020). Namun, jika penerapan tidak konsisten, pengaruhnya dapat melemah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berarti mengikuti peraturan penyusunan laporan akuntansi yang berlaku, dan penerapan ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan pedoman, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas memadai. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Rohmah dkk. (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan searah antara pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Malang.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

SIA mempercepat alur informasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akurasi data. Tetapi, tanpa keterampilan pengguna yang memadai, manfaatnya tidak signifikan. Dengan sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan akan semakin baik, karena sistem ini dapat mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada publik. Temuan ini didukung oleh penelitian Ningsih dkk. (2023) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian internal mencegah kesalahan dan kecurangan, sehingga laporan lebih andal. Namun, implementasi yang lemah dapat mengurangi efektivitasnya. Penelitian Khoer dkk. (2022) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kecamatan Pabuaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh SKPD, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aziyah dan Yanto (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian intern yang baik dapat memperlancar pencapaian target yang ditetapkan pemerintah, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan

Sumber daya manusia merupakan aset dan kekayaan paling berharga dalam setiap aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tugas yang harus dilaksanakan, sehingga laporan keuangan dapat disusun dan disajikan tepat waktu. Kualitas sumber daya manusia juga menjadi elemen kunci dalam laporan keuangan daerah. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan disiplin akademik yang kuat, kualitas laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan. Pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik akan lebih mampu menyusun laporan sesuai standar. Sebaliknya, kompetensi rendah menyebabkan laporan tidak akurat. Lebih lanjut, penelitian Khoer dkk. (2022) menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kecamatan Pabuaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia suatu SKPD, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kediri yang berjumlah 96 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dan diperoleh

sampel sebanyak 49 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju). Kuesioner terdiri dari 24 item pernyataan yang mewakili lima variabel: penerapan SAP (6 item), pemanfaatan SIA (5 item), pengendalian internal (5 item), kompetensi SDM (4 item), dan kualitas laporan keuangan (4 item). Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson, dengan hasil seluruh item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,278$ (r_{tabel} , $n=49$, $\alpha=0,05$), sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai $> 0,70$ pada semua variabel (SAP = 0,82; SIA = 0,80; Pengendalian Internal = 0,79; Kompetensi SDM = 0,84; Kualitas Laporan Keuangan = 0,81), yang berarti instrumen reliabel. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, dipilih karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen yang diduga memengaruhi satu variabel dependen. Analisis dilakukan dengan bantuan SPSS versi 26, didahului oleh uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) untuk memastikan kelayakan model regresi.

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Statistik Uji	Unstandardized Residual
N	49
Normal Parameters	
Mean	0.0000000
Std. Deviation	1.11646144
Most Extreme Differences	
Absolute	0.068
Positive	0.062
Negative	-0.068
Test Statistic	0.068
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{cd}

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Hal ini terlihat dari grafik histogram yang simetris serta normal probability plot yang menunjukkan sebaran titik mengikuti garis diagonal. Secara statistik, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200-(>0.05), sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

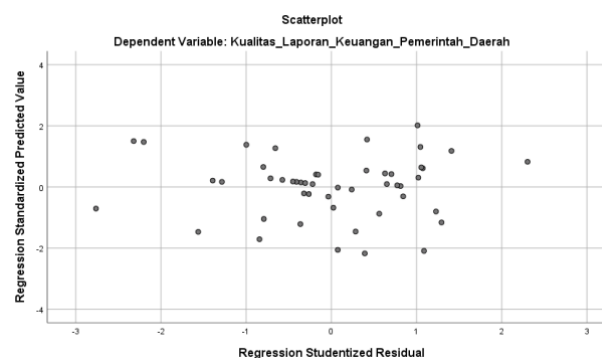
Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Tolerance	VIF
1	(Constant)	–	–
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.111	9.039
	Sistem Informasi Akuntansi	0.080	12.537
	Sistem Pengendalian Internal	0.088	11.397
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.116	8.617

Untuk hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa X1 dan X4 memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, sedangkan X2 dan X3 memiliki nilai tolerance di bawah 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) diatas 10. Dengan demikian, terdapat gejala multikolinearitas pada variabel X2 dan X3 dalam model.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1 Scatterplot

Pada uji heteroskedastisitas, scatterplot menunjukkan sebaran titik residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik di atas maupun di bawah sumbu nol. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, Namun berdasarkan hasil uji Glejser variabel Sistem Informasi Akuntansi (X2) memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi gejala heteroskedastisitas pada variabel X2, sehingga perlu dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap variabel tersebut dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis uji regresi linear berganda, didapatkan persamaan bentuk persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 3 Regresi Linier Berganda

Model	Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)
1	(Constant)	0.192	0.612	–
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	-0.050	0.098	-0.214
	Sistem Informasi Akuntansi	0.212	0.104	1.010
	Sistem Pengendalian Internal	-0.145	0.107	-0.643
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.017	0.095	0.072

Berdasarkan tabel dapat di susun persamaan sebagai berikut:

$$Y=0,192-0,050X_1+0,212X_2-0,145X_3+0,017X_4+e$$

Berdasarkan persamaan analisis regresi linear berganda pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,192 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka nilai dasar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,192. Artinya, tanpa adanya pengaruh dari penerapan standar akuntansi, sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, maupun kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan masih memiliki nilai positif meskipun relatif rendah.

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar -0,050 dengan nilai beta -0,214. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan penerapan standar akuntansi justru cenderung menurunkan kualitas laporan keuangan, meskipun pengaruhnya relatif kecil. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penerapan SAP belum dilakukan secara substansial, melainkan masih bersifat formal atau administratif.

Selanjutnya, variabel Sistem Informasi Akuntansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,212 dan nilai beta tertinggi, yaitu 1,010. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh positif paling besar terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, semakin efektif penerapan sistem informasi akuntansi, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, karena sistem ini mampu mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data.

Variabel Sistem Pengendalian Internal menunjukkan koefisien regresi -0,145 dengan beta -0,643, yang berarti pengaruhnya negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai negatif ini menggambarkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan belum berjalan efektif atau bahkan dapat menghambat proses pelaporan apabila terlalu birokratis dan tidak adaptif terhadap dinamika organisasi.

Terakhir, variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,017 dengan nilai beta 0,072. Meskipun pengaruhnya relatif kecil, arah hubungan positif menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya kemampuan teknis dan profesionalisme pegawai dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dengan benar.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa di antara keempat variabel yang diuji, Sistem Informasi Akuntansi memiliki kontribusi paling besar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel lainnya menunjukkan pengaruh yang lemah atau berlawanan arah.

Uji t

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk melihat apakah penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji t membantu mengidentifikasi variabel mana yang memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Tabel 4 Uji t

Variabel	Koefisien t-Hitung		Sig.	Keterangan
(Constant)	0.379	0.347	0.730	Tidak Signifikan
Standar Akuntansi Keuangan	0.338	1.929	0.060	Tidak Signifikan
Sistem Informasi Akuntansi	0.188	1.008	0.319	Tidak Signifikan
Pengendalian Internal	0.096	0.502	0.618	Tidak Signifikan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.402	2.371	0.022	Signifikan

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan aparatur pengelola keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan yang dihasilkan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran sumber daya manusia yang kompeten dalam memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan secara akurat.

Sementara itu, variabel Standar Akuntansi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengendalian Internal menunjukkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,060, 0,319, dan 0,618,

yang semuanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan standar akuntansi dan sistem informasi belum sepenuhnya dioptimalkan dalam praktik, serta efektivitas pengendalian internal mungkin masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil ini mengisyaratkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem dan regulasi, tetapi terutama pada kualitas sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan, menafsirkan, dan menerapkan kebijakan akuntansi secara tepat dan konsisten.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,060, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti penerapan standar akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas laporan. Banyak instansi masih berfokus pada aspek kepatuhan administratif tanpa memperhatikan substansi penerapan, seperti pengakuan dan pengukuran transaksi secara akrual yang benar. Akibatnya, laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Aprsiansyah dkk. (2020) yang menyatakan bahwa penerapan SAP tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan, terutama jika penerapannya masih bersifat formal dan belum didukung oleh pemahaman teknis yang memadai.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,319, yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan SIA tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh aparatur. Efektivitas SIA sangat bergantung pada kemampuan pengguna, kualitas data yang diinput, serta integrasi antar-unit organisasi. Dalam banyak kasus, sistem informasi hanya berfungsi sebagai alat pencatatan formal tanpa digunakan untuk analisis atau pengawasan keuangan yang lebih mendalam.

Temuan ini sejalan dengan Tarigan (2021) yang menyebutkan bahwa teknologi informasi tidak otomatis meningkatkan kualitas pelaporan apabila tidak diimbangi dengan pelatihan pengguna, tata kelola TI yang baik, serta dukungan manajerial.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,618, yang lebih besar dari 0,05. Artinya, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dapat terjadi karena mekanisme pengendalian internal belum diterapkan secara menyeluruh atau masih bersifat administratif tanpa pengawasan yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kontrol seringkali hanya sebatas pemenuhan prosedur tanpa memperhatikan efektivitasnya dalam mencegah kesalahan atau kecurangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2019) yang menemukan bahwa pengendalian internal tidak selalu efektif memengaruhi kualitas laporan apabila tidak diikuti oleh komitmen dan evaluasi berkelanjutan dari pimpinan organisasi.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien positif sebesar 0,402 menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil ini menegaskan pentingnya peran aparatur pemerintah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi yang baik memungkinkan pegawai memahami penerapan SAP dengan benar, mengoperasikan sistem informasi secara efektif, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Angely (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena faktor manusia merupakan komponen utama dalam keberhasilan penerapan sistem akuntansi dan pengendalian internal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan penerapan Pengendalian Internal belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dan sistem yang ada masih cenderung bersifat formalitas administratif, belum menyentuh aspek substansial yang benar-benar meningkatkan akurasi, transparansi, dan relevansi informasi keuangan. Meskipun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah diterapkan, efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya pemahaman teknis dan lemahnya komitmen dalam penerapan prinsip akuntansi yang benar. Demikian pula, keberadaan sistem informasi dan mekanisme pengendalian internal belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat analisis dan pengawasan yang mendukung kualitas pelaporan.

Sebaliknya, kompetensi sumber daya manusia terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa faktor manusia menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan penerapan standar akuntansi, pengoperasian sistem informasi, serta efektivitas pengendalian internal. Pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas tinggi mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah daerah lebih memfokuskan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur. Program pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang akuntansi pemerintahan, sistem informasi keuangan, serta manajemen pengendalian internal perlu digalakkan secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan Standar Akuntansi Keuangan hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus diinternalisasikan sebagai bagian dari budaya akuntabilitas dan transparansi organisasi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem informasi serta mekanisme pengendalian internal agar keduanya benar-benar berfungsi dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian, integrasi antara kebijakan, sistem, dan kompetensi sumber daya manusia dapat tercapai untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara sebenarnya.

REFERENSI

Almuntahanah, A., & Samukri, S. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 146-154.

- Andi Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Sains Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 51–63. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- Ardhiarisca, O., Sugiartono, E., & Sari, R. P. (2023). Analisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 12(1), 21–26.
- Ardianto, D., Ningsih, W., Murti, G. T., Sondakh, A. G., Febriansyah, F., Alfian, A., & Dwianika, A. (2023). Sistem informasi akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 50–61.
- Atika, K. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme kerja terhadap kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) Pelaksana Pembangkit Bukit Asam Tanjung Enim. *Jurnal Manajemen*, 12(3), 355–366.
- Ayuningsih, L., Mawardi, M. C., & Sari, A. F. K. (2022). Pengaruh implementasi sistem manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malang. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(4), 1–15.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.884>
- Dewi, N. P. R. F., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(1), 387–399.
- Eo, E., Goo, K., Lamawitak, P. L., & Nipa, U. N. (2021). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 98–110.
- Fazlurahman, F., & Afiah, N. N. (2021). Pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penatausahaan aset tetap. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 2(2), 1719–1729. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1941>
- Fish, B. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada perangkat daerah Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1–9.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, C., Mawardi, M., & Hariri. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sampang (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Sampang). *E-Jurnal Riset Akuntansi*, 11(6), 97–105.
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39–47.
- Indonesia, Presiden Republik. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Iqbal, M., Sofwan, S. V., & Mariam, R. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 1–15.

- Khoer, I. M., & Atnawi, A. (2022). Pengaruh sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan laporan keuangan desa. *Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, 9(1), 12–23.
<https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/754/635>
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan keuangan, sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1364–1376.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murwani, A. S., & Astuti, R. P. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 4(1), 1–12.
- Fitrania, N. A., Martini, R., & Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh penatausahaan aset tetap, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Palembang. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 2(2), 115–125.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prasetyaningrum, Y. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. *EBISTEK*, 3(1), 1–14.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(5), 1–10.
- Saputri, H., Kusnaedi, U., & Asmana, Y. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan jasa di Jakarta Utara. *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 100–112.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berpikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Wijaya, D. A., & Priono, H. (2022). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja karyawan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5409–5420.